Resensi Buku Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital



Judul	**:**	***Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital***
Penulis	**:**	**Sepriano, S.Sos., M.Kom., CBPA; Dr. H. Asep Hikmat, M.Si., C.STMI., C.PS; Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si., CIPM., CBOA., CSOPA; Afni Nooraini, S.IP., M.Si.; Sundari, S.A.P., M.A.P.; Dr. Salamatul Afiyah, M.Si.; Anny Riwayati, S.E., M.Si.; Cynthia Febri Sri Indarti, S.IP., M.Si.**
Editor	**:**	**Efitra**
Penyunting	**:**	**Andra Juansa**
Penerbit	**:**	**PT. Sonpedia Publishing Indonesia**
ISBN	**:**	**978-623-8345-15-1**
Cetakan	**:**	**Pertama, Juli 2023**
Tebal	**:**	**146 halaman**

Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara pemerintah menjalankan fungsinya dan memberikan pelayanan publik. Digitalisasi tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pengadaan perangkat teknologi informasi, pembangunan aplikasi, atau migrasi pelayanan dari loket fisik ke *platform* daring. Lebih jauh, transformasi digital menuntut perubahan cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, mengelola data, membangun hubungan dengan masyarakat, serta mendesain kebijakan publik.

Dalam konteks tersebut, buku *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital* memberikan pembahasan mengenai hubungan antara administrasi publik dan perkembangan teknologi digital. Buku ini secara eksplisit menempatkan transformasi digital sebagai kebutuhan bagi administrasi publik dan menekankan peluang teknologi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta aksesibilitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, buku ini juga mengingatkan pembaca terhadap persoalan keamanan data dan resistensi terhadap perubahan.

Buku ini menarik untuk dibaca karena mencoba menghubungkan perspektif klasik administrasi publik dengan sejumlah isu kontemporer seperti *e-government*, *open government*, *big data*, keamanan siber, *mobile government*, pelayanan publik digital, manajemen perubahan, regulasi, dan kemitraan antara publik dan swasta. Dengan demikian, buku ini tidak hanya membahas teknologi sebagai instrumen, tetapi mencoba menempatkannya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Secara struktural, buku terdiri atas delapan bagian. Bagian pertama membahas definisi dan konsep administrasi publik pada era digital; bagian kedua membahas peran dan tanggung jawab administrasi publik; bagian ketiga membahas dampak positif transformasi digital; bagian keempat menguraikan tantangan dan hambatan; bagian kelima membahas *e-government* dan pelayanan publik digital; bagian keenam membahas kebijakan dan regulasi; bagian ketujuh membahas manajemen perubahan; dan bagian kedelapan mengulas kemitraan publik-swasta dalam transformasi administrasi publik.

Ada beberapa kekuatan utama buku ini. Pertama, penulis tidak membatasi transformasi administrasi publik pada *e-government*; kedua, buku ini mampu menghubungkan teknologi dengan fungsi administrasi publik; ketiga, buku ini relevan bagi praktisi pemerintahan; dan keempat, buku ini memberikan penjelasan terkait sisi gelap transformasi digital.

Dari perspektif peneliti kebijakan publik, kontribusi penting buku ini adalah penegasan bahwa transformasi digital harus dilihat sebagai agenda perubahan administrasi publik, bukan sekadar proyek teknologi. Ada setidaknya lima implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari pembacaan buku ini: pertama, digitalisasi harus berorientasi pada penyelesaian masalah publik; kedua, transformasi digital membutuhkan reformasi proses bisnis; ketiga, kapasitas aparatur merupakan faktor kunci; keempat, tata kelola data harus menjadi agenda inti; dan kelima, transformasi digital harus tetap berorientasi pada publik.

Secara keseluruhan, buku *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital* merupakan buku yang relevan sebagai pengantar untuk memahami hubungan antara perkembangan teknologi digital dan perubahan administrasi publik. Namun, dari perspektif akademik yang lebih kritis, buku masih dapat dikembangkan melalui penguatan teori, analisis empiris, studi kasus komparatif, pengukuran dampak transformasi digital, isu interoperabilitas, inklusi digital, tata kelola data, serta perkembangan artificial intelligence dalam pemerintahan.
Dengan demikian, buku ini lebih tepat diposisikan sebagai buku pengantar dan referensi konseptual-praktis daripada sebagai kajian empiris mendalam mengenai transformasi digital pemerintahan. Nilai penting buku ini justru terletak pada pesan dasarnya: transformasi administrasi publik tidak boleh berhenti pada digitalisasi pelayanan. Transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika teknologi mampu mengubah cara pemerintah memahami masalah, merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, memberikan pelayanan, berinteraksi dengan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik.

Dalam konteks tersebut, buku ini relevan tidak hanya bagi mahasiswa dan akademisi administrasi publik, tetapi juga bagi ASN, pejabat pemerintah, analis kebijakan, perencana pembangunan, dan para pengambil keputusan yang sedang menghadapi tuntutan membangun pemerintahan yang lebih adaptif di era digital.

Buku ini layak dibaca terutama bagi pembaca yang membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai transformasi administrasi publik dan ingin melihat bagaimana teknologi, organisasi, regulasi, pelayanan publik, serta kemitraan antarsektor saling berkaitan dalam proses perubahan pemerintahan. Bagi peneliti dan praktisi kebijakan publik, buku ini relevan terutama karena transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar agenda teknologi, melainkan agenda reformasi administrasi dan perubahan tata kelola pemerintahan.

Penulis: Candra Setya Nugroho, S.H., M.AP. (Analis Kebijakan Ahli Muda Pusjar SKTAN LAN)

LEMBAR ABSTRAKSI (*CURRENT CONTENT*)
TAHUN 2026

1. **Strategi Pengembangan Desa Wisata melalui Pendekatan Analisis SWOT: Studi Kasus Tugu Utara, Kabupaten Bogor;** oleh Iwan Kurniawan, Laksmi Fitriani, Melati Dewi Asri, dan Ramdani Priatna; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
   This study explores the development strategy of Tugu Utara Tourism Village, Bogor Regency, using a SWOT analysis approach (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The purpose of this research is to design an effective and sustainable strategy for rural tourism development by identifying the internal and external factors that influence it. The research method employed is a descriptive-qualitative approach, with data collection techniques including interviews, field observations, and document studies. The results indicate that Tugu Utara Village possesses abundant natural resources and high human resource potential but is still constrained by inadequate infrastructure, weak coordination among stakeholders, and limited financial support. The recommended strategy, based on the SWOT quadrant, is a diversification strategy that leverages existing strengths to address emerging threats. This research emphasizes the importance of collaboration between the community, government, and private partners in creating competitive and sustainable tourism products. The application of ecotourism principles has been gradually implemented as the foundation for developing the tourism village. In addition, enhancing human resource capacity, improving infrastructure, and utilizing information technology are key factors for the success of this strategy.
   Keywords: *tourism village, SWOT analysis, development strategy, diversification strategy, ecotourism.*

2. **Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi berbasis *E-learning* melalui Program *Flexible Micro Learning* di Instansi Pemerintah;** oleh Widaningsih; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
   This study analyses the implementation of e-learning-based competency development policy at the Center for Learning and Policy Strategy for National Civil Service Talent, National Institute of Public Administration, through the Flexible Micro Learning (FML) program. The research employs a descriptive quantitative approach using Edwards III's policy implementation model, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure dimensions. Data were collected from 54 civil servants participating in the FML program through questionnaires and structured interviews. The findings indicate that policy implementation falls into the "good" category with an overall score of 86.87%. The resources dimension obtained the highest score (87.70%), followed by communication (87.00%), disposition (86.88%), and bureaucratic structure (84.41%). However, several obstacles were identified, including time limitations, a shortage of specialised human resources (Instructional Technology Developers), budget constraints, and the absence of detailed operational standards. Through SWOT analysis, this study formulates four strategic recommendations: strengthening external collaboration, developing human resource collaboration strategies, mitigating policy and technical risks, and conducting regular consultations with stakeholders.
   Keywords*: civil servants, competency development, e-learning, microlearning, policy implementation.*

3. **Analisis Efikasi Diri Aparatur Sipil Negara berdasarkan Perspektif Lintas Generasi dan Gender di Era Transformasi Birokrasi;** oleh Perdhana Ari Sudewo dan Syifa Kamila Defayani**;** Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
   Self-efficacy plays a critical role in supporting bureaucratic transformation among Indonesian civil servants, which increasingly demands adaptability and innovation. This study aims to examine

differences in self-efficacy across generational cohorts (X, Y, and Z) and gender. A comparative quantitative approach was employed, using stratified random sampling based on generational and gender categories. The findings reveal significant differences in self-efficacy across generations and gender. Generation X demonstrated the highest level of self-efficacy, followed by Generation Z, while Generation Y showed the lowest. Male civil servants reported higher self-efficacy than their female counterparts. Interaction analysis further indicated that males from Generation Z and females from Generation X exhibited the highest self-efficacy within their respective groups. Actionable recommendations highlight the importance of generation- and gender-sensitive human resource development, strengthening mentoring and coaching systems, and broadening work experiences through job rotation and cross-functional collaboration to enhance self-efficacy. This study contributes to the organizational psychology literature by providing a cross-generational and gender-based perspective within the context of Indonesian civil servants and offers more targeted policy implications for public sector human resource development.
***Keywords**: civil servants, generational differences, gender, bureaucratic transformation, self-efficacy.*

4. **Optimalisasi Komunikasi Layanan Kebersihan melalui Chatbot: Studi Empiris di Kelurahan Sindangjawa Kabupaten Cirebon;** oleh Leni Rohida dan Eteh Resa**;** Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
The primary issue of this research is the communication challenges in managing illegal waste in rural areas, which require a rapid response. Conventional sanitation service communications have proven slow and unresponsive, hampering the optimization of rapid and effective public services. The objective of this empirical study is to analyze the optimization of sanitation service communications through the implementation of a chatbot in Sindangjawa Village from a user acceptance perspective. The method used was a quantitative explanatory survey design, adopting the Technology Acceptance Model (TAM) framework. Data were collected from Sindangjawa resident respondents using a Likert-scale questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results indicate that Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use (PEU) have a positive and significant influence on Chatbot Use Intention. Communication optimization occurs through drastic operational efficiencies, as evidenced by a reduction in initial response times and the ability to automate repetitive tasks. In conclusion, chatbots are a strategic tool for improving public service performance at the village level, but long-term adoption must be supported by quality problem-solving skills and mitigation of ICT barriers.
***Keywords:** public service chatbot, waste management communication, Technology Acceptance Model (TAM).*

5. **Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciputat Pascarevitalisasi;** oleh Nida Amalia dan Muhammad Khoirul Anwar; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
The regulation of street vendors (PKL) at Ciputat Market following its revitalization indicates that efforts to reorganize public spaces in South Tangerang City still face challenges, particularly as street vendors continue to sell on the streets and sidewalks despite the availability of the revitalized market building. This has resulted in low occupancy rates. This study aims to identify and analyze the strategies employed by the South Tangerang City Industry and Trade Office in regulating street vendors at Ciputat Market following the revitalization, using Geoff Mulgan's (2009) theoretical framework on government strategy as the analytical tool. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The research results indicate that the objective indicators have been formulated clearly and purposefully. Environmental indicators are supported by relatively adequate conditions and resources, although they

have not yet been fully optimized strategically. The steering indicators demonstrate effective coordination across Regional Government Agencies (OPDs) through clear instructions and task allocation. Regarding the action indicators, enforcement efforts have successfully improved the physical order of the area, but this has not yet been followed by the optimization of economic activities within the market. Meanwhile, the learning indicators show that evaluation processes have been conducted, but they have not yet been systematically institutionalized and are not fully based on feedback from vendors.

Keywords: *strategy, industry and trade office, law enforcement, street vendors.*

6. **Administrasi Pembangunan Desa dan Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokal dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka);** oleh Siti Khumayah, Leni Rohida, Siti Adira Kania, dan Nisrina Nur Alfi Laili; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.

   The issue examined in this study concerns the utilization of village funds for rural development and the strengthening of local human resource competencies allocated annually by the central government. The purpose of this study is to identify the inhibiting and supporting factors as well as the efforts made by the village administration in managing village funds in the areas of village development and strengthening local human resources. This study uses descriptive qualitative methods with a focus on reviewing relevant literature, documents, and archives. The research findings indicate that the use of village funds for village development and strengthening the competence of local human resources in Majalengka Regency has not been fully implemented ideally according to the parameters. Village development administration still faces several challenges, including inadequate village apparatus, complicated regulations, lack of supporting infrastructure, and a village bureaucratic culture that has not completely changed. According to the study, bureaucratic administrative reform at the village level must be carried out in order to improve the capabilities of local human resources through continuous training, increased supervision and transparency, and optimization of the digital village administration system as strategic measures.

   Keywords: *village funds, rural development, human resources, bureaucratic reform.*

7. ***Enhancing Person-Job Fit in Government Agencies using DISC Personality Profiling;*** oleh Fandi Ahmad, Fikri Aditya, dan Hendra Nugroho Saputro; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.

   Proses rekrutmen sangat penting bagi kinerja organisasi, terutama di lembaga sektor publik. Di sini, kualitas sumber daya manusia secara langsung memengaruhi hasil pemberian layanan. Politeknik STIA LAN Bandung sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi sektor publik, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja karyawan. Evaluasi tahunan menyoroti permasalahan seperti produktivitas rendah, absensi, dan berkurangnya keterlibatan karyawan. Studi ini menggunakan metode campuran dengan desain deskriptif-eksploratif untuk mengevaluasi keselarasan antara sifat kepribadian calon karyawan dan spesifikasi pekerjaan. Kerangka kepribadian DISC diterapkan pada 83 kandidat yang terdiri dari pelamar baru maupun peserta perpanjangan kontrak. Setelah dilakukan penyaringan administratif, diperoleh kandidat yang memenuhi syarat untuk penilaian DISC sebanyak 39 peserta. Semua kandidat yang memenuhi syarat menjalani pengambilan sampel total dan 37 kandidat maju ke wawancara evaluasi kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan hasil tes DISC yang distandarisasi dan statistik deskriptif untuk memetakan profil perilaku. Analisis kualitatif menafsirkan keselarasan perilaku dengan persyaratan pekerjaan. Temuan menunjukkan bahwa profil berbasis DISC merupakan alat pelengkap yang efektif dalam proses rekrutmen. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyelaraskan kecenderungan perilaku individu dengan tuntutan pekerjaan dapat meningkatkan kesesuaian antara kepribadian individu dan pekerjaan. Penyelarasan ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, mendukung kinerja yang lebih tinggi, dan membantu mencapai tujuan organisasi.
Kata Kunci: *person-job fit*, karakteristik kepribadian, manajemen SDM sektor publik, analisis kepribadian DISC.

8. ***Multiple Perspective Analysis* pada Penanganan Kejadian Luar Biasa Campak di Kabupaten Sumenep: Analisis Tata Kelola Kesehatan Daerah dan Alternatif Kebijakan;** oleh Laras Lingganingrum, Yuni Khofifah Endar Parawangsa, Nada Nafira Almanzani, Bima Dwi Putra Bhayangkara, dan Dominikus Savio Sasi; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
The measles outbreak in Sumenep Regency was declared an extraordinary event (KLB) in August 2025, with 2,139 suspected cases and 17 child deaths. This situation highlights significant challenges in the capacity of regional health services, particularly in terms of emergency immunization coverage, which has only reached 91.3%, falling short of the herd immunity threshold of 95%. This study aims to analyze structural weaknesses in local health governance and formulate policy interventions to strengthen health workforce capacity, immunization outreach, and outbreak response in Sumenep's archipelagic areas. The methods used include Multiple Perspective Analysis (technical, organizational, and personal), followed by forecasting techniques and comparison of policy alternatives. The analysis results indicate that the main problem is governance failure rooted in organizational capacity, as evidenced by the lack of public health personnel for promotive and preventive functions in 77% of Community Health Centers (Puskesmas) in Sumenep, which significantly hampers the distribution of services in the archipelago. Key recommendations include strengthening human resource management through redistribution of personnel, training, and performance-based incentives. This study confirms that structural reform in health human resource governance is a prerequisite for improving public service performance and preventing similar outbreaks in the future.
Keywords: *herd immunity, extraordinary event, Multiple Perspective Analysis (MPA), measles outbreak, health governance.*

9. **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni);** oleh Adila Alanisagita Pusung, Rachmat Ramdani, dan Kariena Febriantin; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
Perkembangan industri di Kabupaten Karawang meningkatkan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di Rutilahu. Program Pembangunan Rutilahu hadir sebagai solusi permasalahan tersebut, namun pelaksanaannya masih belum tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang menggunakan Model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Model Police Patrol Oversight merupakan pengawasan aktif yang dilakukan oleh DPRD, sedangkan Model Fire Alarm Oversight merupakan pengawasan reaktif berdasarkan pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Police Patrol Oversight dilakukan melalui rapat komisi dan kunjungan lapangan, tetapi belum optimal karena tidak adanya pembahasan khusus program dan kunjungan belum dilakukan secara menyeluruh. Lalu, Model Fire Alarm Oversight terlihat dari respons terhadap pengaduan masyarakat melalui media sosial terkait keterlambatan distribusi material dan kondisi rumah. Namun, model tersebut terkendala oleh belum adanya mekanisme pengaduan resmi dan lemahnya tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan Model Police

Patrol Oversight melalui penjadwalan evaluasi khusus program Rutilahu dan peningkatan intensitas kunjungan lapangan. Penguatan Model Fire Alarm Oversight dilakukan melalui penyediaan mekanisme pengaduan digital dan posko pengaduan di daerah pemilihan yang mudah diakses masyarakat, serta sistem tindak lanjut yang jelas dan terukur terhadap setiap laporan masyarakat.

Kata Kunci: pengawasan DPRD, *fire alarm oversight*, *police patrol oversight*, program pembangunan Rutilahu, Kabupaten Karawang.

10. **Pendekatan DPSIR dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Penelitian di Kabupaten Banyuwangi;** oleh Yusuf Hariyoko, Bintoro Wardiyanto, Falih Suaedi, Ardhi Kurniawan, Ronny Ersya Novianto Putra, dan Muhammad Iqbal Humam; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.

    Tourism is a sector that drives economic growth, creates jobs, and strengthens a region's image. In destinations like Banyuwangi Regency, policy focus has shifted from increasing visitor numbers to strengthening governance to ensure economic benefits do not come at the expense of environmental, cultural, and social quality. This study aims to analyze Banyuwangi's tourism development dynamics through the Driver–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR) framework to examine causal relationships and inform the RIPJPID, given the limited research integrating DPSIR to link research findings with sustainable tourism policy formulation. This study used a qualitative approach with document analysis of secondary data from local government documents and Statistics Indonesia (BPS) data. Findings indicate that drivers, including promotional events, investment, accommodation, and shifting tourist preferences, trigger pressures such as overcrowding, traffic congestion, waste, energy consumption, ecosystem strain, and burdens on public facilities. In the state dimension, gaps were identified in the research and innovation ecosystem, in man-made and cultural tourism. Impacts are twofold: economic benefits alongside risks such as inequality, spatial conflicts, environmental degradation, declining visitor experience, and safety hazards. Recommended responses include carrying-capacity management, zoning, strengthened waste-management governance, transportation integration, CBT, and indicator-based monitoring to ensure research supports measurable and sustainable policies.

    Keywords: *Banyuwangi, DPSIR, innovation research, RIPJPID, tourism.*

11. ***Information and Communication Technology (ICT)'s Dual Role in Work-From-Anywhere (WFA) Arrangements: A Thematic Review of the Paradox of Connectivity;*** oleh Herman, Ade Sobandi, Rasto, dan Darman Fauzan Dhahir; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.

    Adopsi global *Work-From-Anywhere* (WFA) yang cepat, dimungkinkan oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengubah organisasi kerja. Dipandu oleh pertanyaan tentang bagaimana TIK sekaligus meredakan dan memperburuk tantangan WFA, tinjauan literatur tematik ini menyintesis 40 studi *peer-reviewed* yang dipilih melalui proses penyaringan hibrida dengan bantuan Scopus AI dan panduan SPIDER. Kami mengembangkan kerangka integratif yang mengidentifikasi empat domain ambivalensi teknologi yang saling terkait: (1) teknologi komunikasi yang meningkatkan kolaborasi sekaligus menumbuhkan budaya selalu terhubung; (2) alat manajemen batas yang menawarkan fleksibilitas sekaligus meningkatkan telepressure; (3) infrastruktur digital yang mendukung kesejahteraan sekaligus berkontribusi pada kelelahan digital; dan (4) faktor kontekstual yang memoderasi efek tersebut secara berbeda. Temuan menunjukkan bahwa dampak TIK tidak ditentukan oleh teknologi, melainkan muncul dari interaksi antara keterjangkauan alat, kebijakan organisasi, praktik kepemimpinan, dan keadaan individu.

Tinjauan ini memajukan teori paradoks dengan mengonseptualisasikan peran ganda TIK sebagai ketegangan inheren yang perlu dinavigasi, bukan masalah yang harus diselesaikan. Studi ini berkontribusi pada model Job Demands-Resources dengan memosisikan TIK sebagai sumber daya sekaligus tuntutan, dan pada teori batas dengan mengidentifikasi pergeseran kerja batas dari spasial ke temporal-psikologis. Rekomendasi berbasis bukti dan agenda riset disediakan untuk lingkungan kerja digital yang berkelanjutan, setara, dan manusiawi.

Kata Kunci: *Work-From-Anywhere* (WFA), *technostress*, kelelahan digital, manajemen batas, sistem sosial-teknis.

12. **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau;** oleh Achmad Gilang Ikhsan Susanto, Ira Patriani, dan Iving Arisdiyto; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.

This study aims to analyze the implementation of local government policies in addressing illegal gold mining activities (Pertambangan Emas Tanpa Izin/PETI) in Nanga Mahap District, Sekadau Regency. Illegal gold mining activities not only cause river pollution and environmental degradation but also serve as a primary source of livelihood for some local communities, creating a dilemma in policy implementation. The study employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Environmental Agency, Nanga Mahap Sub-district Office, the local police, and affected communities. The analysis uses the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. The findings indicate that the implementation of PETI control policies has not been optimal due to unclear operational standards, limited institutional authority and resources, weak inter-agency communication, and strong socio-economic dependence of communities on illegal mining activities. Although policy implementers demonstrate commitment to environmental protection, policy execution remains fragmented and unsustainable. Therefore, strengthening inter-agency coordination, improving institutional capacity, and providing sustainable alternative livelihoods for local communities are needed.

Keywords: *implementation, public policy, illegal gold mining.*

13. ***Governance of Digital Labor Market Innovation: A Case Study of* "Ado Gawe Palembang" *on* TikTok;** oleh Dhian Anggrainie, Novita Wulandari, dan Muhammad Abduh; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dalam mengoptimalkan layanan informasi ketenagakerjaan "Ado Gawe Palembang" menggunakan media sosial TikTok sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta memanfaatkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola inovasi layanan informasi ketenagakerjaan "Ado Gawe Palembang" telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), meskipun penerapannya baru tercapai sebagian. Dinas Ketenagakerjaan telah menerapkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan inovasi ini sebagai instrumen pengurangan pengangguran, termasuk melalui modernisasi dan digitalisasi layanan publik. Berdasarkan pembahasan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola inovasi layanan informasi ketenagakerjaan berbasis TikTok "Ado Gawe Palembang" yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang telah menunjukkan

potensi dalam mendukung layanan ketenagakerjaan daerah dengan meningkatkan akses terhadap informasi pasar kerja serta memfasilitasi proses pencocokan kerja (job matching) antara pencari kerja dan pemberi kerja. Inovasi ini memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pasar kerja yang cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga mempercepat proses pencocokan kerja antara pencari kerja dan dunia usaha.
Kata Kunci: tata kelola, inovasi, layanan, ketenagakerjaan, pengangguran.

14. **Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional Perdesaan;** oleh Siti Khumayah, Leni Rohida, dan Riyadi; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
This study aims to analyze the relationship between development administration governance, local human resource empowerment, and the sustainability of traditional food-based creative economies in rural areas. The study employs a Systematic Literature Review approach based on the PRISMA 2020 guidelines. The literature was searched through Google Scholar and Garuda, focusing on publications concerning development administration, community empowerment, rural creative economy, traditional food, MSME digitalization, and economic development. Articles were selected based on relevance, full-text availability, clarity of publication identity, and contribution to the research questions. The data were analyzed through data extraction and thematic synthesis. The findings are as follows. First, development administration functions as enabling governance through policy formulation, planning, cross-sector coordination, facilitation, institutional strengthening, monitoring, and evaluation. Second, local human resource empowerment requires more than technical training; it also involves production skills, innovation, entrepreneurship, business management, digital literacy, and entrepreneurial agency. Third, village economic institutions, cross-sector collaboration, digital marketing, and cultural preservation constitute mechanisms linking policy support to business sustainability. This study proposes a Governance–Capability–Cultural Digital Ecosystem Model that links development governance, local capabilities, economic institutions, digital market access, and cultural values to the sustainability of traditional food-based creative economies.
Keywords: *development administration, rural creative economy, traditional food, local human resource empowerment, systematic literature review.*

15. **Penerimaan Layanan Publik Digital di Kota Bogor: Analisis Extended Technology Acceptance Model;** oleh Muhammad Iqbal dan Rudy Sutanto; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
This study analyzes the factors influencing citizens' reluctance to use digital public services through an Extended Technology Acceptance Model. A quantitative approach was employed using survey data collected from 100 respondents in Bogor City. The data were obtained through questionnaires and analyzed in Stata using path analysis based on structural equation modeling. The proposed model examined the effects of digital literacy, perceived ease of use, perceived usefulness, trust, and perceived risk on behavioral intention and the actual use of digital public services. The results show that digital literacy positively affects perceived ease of use and perceived usefulness. Perceived ease of use, perceived usefulness, and trust positively influence behavioral intention, whereas perceived risk has a negative effect. Behavioral intention also positively affects actual use. Trust emerges as the strongest determinant of citizens' intention to use digital services. These findings indicate that successful e-Government implementation depends not only on technological convenience but also on service reliability, data protection, digital literacy, and the government's ability to provide clear and consistent service follow-up.

Keywords: *e-Government, digital public services, Technology Acceptance Model (TAM), trust, digital literacy.*

16. ***Policy Innovation for Protecting Online Motorcycle Taxi Drivers in Jakarta's Platform Ecosystem,*** Oleh Wida Aristanti, Ferry Setyadi Atmadja, dan Windy Permata Suyon; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan kerja driver ojek online dalam ekosistem platform di Jakarta serta merumuskan model inovasi kebijakan perlindungan kerja yang lebih implementatif dan terukur. Studi ini berangkat dari pandangan bahwa kerentanan driver tidak hanya dipengaruhi fluktuasi permintaan pasar, tetapi juga mekanisme tata kelola platform digital melalui alokasi order, insentif berbasis kinerja, sistem rating, komplain, dan sanksi pembatasan akses. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 18 driver ojek online, diperkuat dengan observasi terbatas, analisis dokumen, dan penelusuran artefak digital. Data dianalisis secara tematik melalui teknik explanation building serta triangulasi antarsumber untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kerja driver masih lemah akibat belum adanya standar minimum yang dapat diaudit pada titik kontrol digital, fragmentasi kewenangan lintas sektor, keterbatasan data dan pengawasan, serta rendahnya transparansi pengaduan dan pemulihan akses. Penelitian mengusulkan enam pilar kebijakan: standar perlindungan minimum, jaminan sosial adaptif, keselamatan dan kesehatan kerja berbasis risiko, akuntabilitas platform, implementasi kolaboratif, dan indikator evaluasi terukur. Temuan menegaskan perlunya perlindungan driver sebagai isu tata kelola kerja digital yang menjamin standar, keadilan prosedural, dan pengawasan negara.

Kata Kunci: driver ojek online, tata kelola platform, manajemen algoritmik, perlindungan kerja, jaminan sosial adaptif.

INDEKS NASKAH TAHUN 2026 BERDASARKAN ABJAD

1. Administrasi Pembangunan Desa dan Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokal dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka); oleh Siti Khumayah, Leni Rohida, Siti Adira Kania, dan Nisrina Nur Alfi Laili; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
2. Analisis Efikasi Diri Aparatur Sipil Negara berdasarkan Perspektif Lintas Generasi dan Gender di Era Transformasi Birokrasi; oleh Perdhana Ari Sudewo dan Syifa Kamila Defayani; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
3. *Enhancing Person-Job Fit in Government Agencies using DISC Personality Profiling*; oleh Fandi Ahmad, Fikri Aditya, dan Hendra Nugroho Saputro; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
4. *Governance of Digital Labor Market Innovation: A Case Study of* "Ado Gawe Palembang" *on* TikTok; oleh Dhian Anggrainie, Novita Wulandari, dan Muhammad Abduh; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
5. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau; oleh Achmad Gilang Ikhsan Susanto, Ira Patriani, dan Iving Arisdiyto; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
6. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi berbasis *E-learning* melalui Program *Flexible Micro Learning* di Instansi Pemerintah; oleh Widaningsih; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
7. *Information and Communication Technology (ICT)'s Dual Role in Work-From-Anywhere (WFA) Arrangements: A Thematic Review of the Paradox of Connectivity;* oleh Herman, Ade Sobandi, Rasto, dan Darman Fauzan Dhahir; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
8. *Multiple Perspective Analysis* pada Penanganan Kejadian Luar Biasa Campak di Kabupaten Sumenep: Analisis Tata Kelola Kesehatan Daerah dan Alternatif Kebijakan; oleh Laras Lingganingrum, Yuni Khofifah Endar Parawangsa, Nada Nafira Almanzani, Bima Dwi Putra Bhayangkara, dan Dominikus Savio Sasi; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
9. Optimalisasi Komunikasi Layanan Kebersihan melalui Chatbot: Studi Empiris di Kelurahan Sindangjawa Kabupaten Cirebon; oleh Leni Rohida dan Eteh Resa; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
10. Pendekatan DPSIR dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Penelitian di Kabupaten Banyuwangi; oleh Yusuf Hariyoko, Bintoro Wardiyanto, Falih Suaedi, Ardhi Kurniawan, Ronny Ersya Novianto Putra, dan Muhammad Iqbal Humam; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
11. Penerimaan Layanan Publik Digital di Kota Bogor: Analisis Extended Technology Acceptance Model; oleh Muhammad Iqbal dan Rudy Sutanto; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
12. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Program Pembangunan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni); oleh Adila Alanisagita Pusung, Rachmat Ramdani, dan Kariena Febriantin; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
13. *Policy Innovation for Protecting Online Motorcycle Taxi Drivers in Jakarta's Platform Ecosystem*, Oleh Wida Aristanti, Ferry Setyadi Atmadja, dan Windy Permata Suyon; Volume 29 Nomor 2 Tahun 2026.
14. Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciputat Pascarevitalisasi; oleh Nida Amalia dan Muhammad Khoirul Anwar; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.

15. Strategi Pengembangan Desa Wisata melalui Pendekatan Analisis SWOT: Studi Kasus Tugu Utara, Kabupaten Bogor; oleh Iwan Kurniawan, Laksmi Fitriani, Melati Dewi Asri, dan Ramdani Priatna; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.
16. Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional Perdesaan; oleh Siti Khumayah, Leni Rohida, dan Riyadi; Volume 29 Nomor 1 Tahun 2026.